



PEMERINTAH PROVINSI BALI
RENCANA KERJA
TAHUN 2025




DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025.

Bali, 19 Agustus 2024
Kepala Dinas,

Dn. I Wayan Ekadina, S.E., M.Si.
NIP. 197012111998031005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun Lalu.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	38
2.4. Review terhadap Rancangan RKPD	45
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	45
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	47
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	47
3.3. Program dan Kegiatan	48
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	51
Bab V Penutup.....	52
Lampiran	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tabel 2.2. Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Golongan
- Tabel 2.3. Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan-jabatan Struktural
- Tabel 2.4. Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
- Tabel 2.5. Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2023
- Tabel 2.7. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
- Tabel 2.8. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Bali Tahun 2025
- Tabel 2.9. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
- Tabel 2.10. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RENSTRA
- Tabel 2.11. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Peningkatan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan pada Tahun 2023
- Tabel 2.12. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Tabel 2.13. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- Tabel 2.14. Realisasi Anggaran Tahun 2023
- Tabel 2.15. Usulan Program/Kegiatan Tahun 2025 dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi Bali
- Tabel 3.1. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025
- Tabel 4.1. Skala Prioritas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Penentuan Pagu Anggaran

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2025 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026. Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 untuk periode satu tahun, yang disusun berpedoman kepada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2025, telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2023 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2024. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis pemberdayaan koperasi dan UKM, baik isu strategis daerah maupun nasional. Koperasi dan UMKM di Provinsi Bali memegang peranan yang sangat penting dan menjadi basis pembangunan ekonomi kerakyatan terhadap ekonomi di Provinsi Bali. Kondisi ini ditunjukkan melalui perkembangan jumlah koperasi di Provinsi Bali yang terus mengalami peningkatan. Di Tahun 2023 total jumlah Koperasi di Provinsi Bali yaitu 5.490 koperasi, total anggota 877.637 orang, total volume usaha Rp18.543.620.188.359, total aset Rp17.960.124.272.608, dengan total pegawai

15.222 orang. Sementara jumlah UMKM di tahun 2023 berjumlah 442.848 UMKM, jumlah UMKM formal 107.656 (24,31%) dan informal 335.192 (75,69%). Sedangkan tahun 2024 jumlah Koperasi di Provinsi Bali 5.515 koperasi (3.800 koperasi aktif dan 1.715 koperasi tidak aktif), total anggota 860.729 orang, total volume usaha Rp21.906.759.125.409, total asset Rp27.561.447.041.058, dan total pegawai 14.540 orang.

Potensi koperasi dan UMKM tersebut dapat menjadi potensi sekaligus ancaman bagi perekonomian Provinsi Bali. Dikatakan demikian karena berkembang atau tidaknya Koperasi dan UMKM tersebut akan berdampak pada perekonomian Provinsi Bali, dan kesejahteraan masyarakat pada khususnya. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, melihat potensi besarnya jumlah Koperasi dan UMKM ini sebagai peluang untuk memperkuat perekonomian dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan dalam rangka pengembangan ekonomi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, yang dapat mempromosikan kerjasama antar anggota komunitas dan meningkatkan akses ke barang dan jasa tingkat lokal. Koperasi dan UMKM sering kali menjadi pusat inovasi dan kreativitas dan cenderung lebih fleksibel dalam menciptakan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang dan ekonomi menjadi lebih beragam karena tidak terlalu bergantung pada beberapa sektor utama dan hal ini membuat perekonomian lebih tangguh terhadap fluktuasi pasar dan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan kesempatan kepada kelompok yang kurang terwakili dalam ekonomi formal, seperti wanita, orang cacat, atau masyarakat adat.

Selain itu, dengan pernah terjadinya pandemic *covid-19* yang sangat berpengaruh pada terpuruknya perekonomian Bali pada saat itu, menjadi bahan referensi untuk melakukan perubahan-perubahan pada masyarakat sehingga juga berdampak pada perubahan pola bisnis pada koperasi dan UMKM. Strategi pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan hal yang sangat penting dengan berbagai isu strategis dan tantangan kedepan yang lebih kompleks. Tantangan kedepan diantaranya adalah tantangan digitalisasi pada hampir semua aspek kehidupan, yang tentu saja akan berpengaruh terhadap koperasi dan UMKM. Sehingga baik Koperasi maupun UMKM harus mampu untuk berkompetisi dengan cara meningkatkan daya saingnya. Adapun peningkatan daya saing itu sendiri, selain dilihat dari aspek harga, juga dilihat dari sisi kualitas dan kreatifitas. Selanjutnya, dalam

upaya meningkatkan daya saing tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, fokus pada peningkatan produksi, pembiayaan, pemasaran, maupun peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas SDM pengelola koperasi dan UKM.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah wajib sinkron dengan RKPD maka maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 adalah dokumen yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun. Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
- 2) Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam pembangunan daerah;

- 3) Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi capaian indikator kinerja Renstra dalam rangka pencapaian target kinerja;
- 4) Menjamin konsistensi keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan memberikan pedoman bagi seluruh bidang lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai target sasaran Renstra yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan tentang pengertian Renja, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB II Tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berisi:

- 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali,
- 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, 3) Review terhadap Rancangan Akhir RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab III Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut: 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, dan 3) Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Dalam Bab II tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berisi:

- 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2) Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 4) Review terhadap Rancangan Akhir RKPD; Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali melaksanakan tugas urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tetap dinyatakan sebagai Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bal.

- a. Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali antara lain:
 - Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah;
 - Melaksanakan tugas Dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

b. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data per April 2024, komposisi kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah:

Tabel 2.1
Pegawai ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	1
2	Strata 2	14
3	Strata 1	37
4	Diploma III	4
5	Diploma II	-
6	SLTA / Sederajat	4
7	SLTP / Sederajat	1
8	SD	-
Total		61

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (April 2024)

Jumlah pegawai ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebanyak 61 (enam puluh satu) orang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) orang perempuan dan 33 (tiga puluh tiga) orang laki-laki. Berdasarkan tabel 2.1 menggambarkan tingkat pendidikan Pegawai ASN pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didominasi oleh Strata 1 (satu) 60,66%, strata 2 (dua) 24,14%, Strata 3 (tiga) 1,72 %, Diploma III 6,56%, SMA 6,90%, serta SLTP 1,72%. Jumlah pegawai ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebanyak 61 (enam puluh satu) orang seperti ditunjukkan pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Pegawai ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan XI (PPPK)	1
2	Golongan IX (PPPK)	1
3	Golongan VII (PPPK)	1
4	Golongan IV	12
5	Golongan III	40
6	Golongan II	6
7	Golongan I	-
Total		61

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (April 2024)

Dari tabel 2.2 menggambarkan bahwa Golongan III mendominasi ASN pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sejumlah 68,97%, Golongan IV 20,69%, Golongan II 10,34%, khusus untuk PPPK terdapat 3 jenis golongan yaitu Golongan XI, Golongan IX dan Golongan VII masing-masing ditempati 1 (satu) orang atau 1,64%.

Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional maka komposisi ASN pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali seperti ditunjukkan pada Tabel 2.3:

Tabel 2.3
Pegawai ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Bali Berdasarkan Jabatan (Struktural dan Fungsional)

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
JABATAN STRUKTURAL		
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	4
Total		10
JABATAN FUNGSIONAL		
1	Perencana Ahli Muda	1
2	Pengawas Koperasi	10
3	Pengembang Kewirausahaan	3
4	Pranata Komputer	1
5	Arsiparis (PPPK)	3
Total		18

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (April 2024)

Dari tabel 2.3 menggambarkan bahwa seluruh Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV sudah terisi, sementara Jabatan Fungsional sudah mengakomodir tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Jumlah Pegawai Non ASN pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebanyak 67 (enam puluh tujuh) seperti ditunjukkan pada tabel 2.4:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Non ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Tenaga Administrasi	40
2.	Sopir	8
3.	Tenaga Teknis/Lapangan	-
4.	Penjaga Malam	8
5.	<i>Cleaning Service</i> dan Tukang Kebun	11
Total		67

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (April 2024)

Berdasarkan tabel 2.4 jumlah pegawai Non ASN sebanyak 67 (enam puluh sembilan) orang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang perempuan dan 44 (empat puluh empat) laki-laki, sangat membantu dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, mengingat didominasi dari generasi milenial penting bagi organisasi untuk memahami dan menghargai peran yang dimainkan oleh generasi millennial dalam lingkungan kerja. Dengan memanfaatkan kekuatan dan karakteristik mereka, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan relevansi mereka dalam era yang terus berubah dengan cepat membawa perspektif unik, keterampilan, dan nilai-nilai ke tempat kerja yang dapat memengaruhi budaya dan produktivitas organisasi.

Sedangkan kondisi aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali seperti ditunjukkan pada tabel 2.5:

Tabel 2.5
Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

No	Golongan	Total		Keterangan
		Jumlah	Satuan	
1	Tanah	6.345	M ²	Sudah diserahkan
2	Bangunan Gedung	4	Unit	Kondisi Baik
3	Kendaraan Operasional Roda 4	10	Unit	Kondisi Baik
4	Kendaraan Operasional Roda 2	14	Unit	Kondisi Baik
5	Meja Kerja	231	Unit	Kondisi Baik
6	Kursi Kerja	229	Unit	Kondisi Baik
7	Komputer	31	Unit	Kondisi Baik
8	Printer	24	Unit	Kondisi Baik
9	Filling Cabinet	29	Unit	Kondisi Baik
10	Rak Kaca/Kayu	23	Unit	Kondisi Baik
11	Lemari Besi/Kayu	24	Unit	Kondisi Baik
12	AC	69	Unit	Kondisi Baik
13	Zice	9	Unit	Kondisi Baik
14	Kursi Tamu	12	Unit	Kondisi Baik
15	Alat Kantor Lainnya	3	Unit	Kondisi Baik

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2023)

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal. Dengan memahami peran aset dinas dalam organisasi dan mengelolanya dengan baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, dan memastikan kepatuhan serta keamanan. Ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Provinsi Bali dan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 sebagai hasil pelaksanaan Renstra tahun kelima akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2023

No	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						KIN	KEU	KIN	KEU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI					17.166.732.546		15.162.882.072			
1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	15.603.195.434	82,69 Nilai	13.822.138.203			

				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	3 Dokumen	81.196.792	3 Dokumen	80.593.317			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	78.873.292	2 Dokumen	78.344.117			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	2.323.500	1 Dokumen	2.249.200			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	75 Orang	13.142.384.786	75 Orang	11.632.298.785			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	75 Orang	13.142.384.786	75 Orang	11.632.298.785			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Laporan	196.596.500	1 Laporan	136.166.186			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	9.999.100	1 Paket	9.895.000			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.298.700	1 Paket	36.622.776			

				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	55.000.000	1 Paket	54.400.000			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	12.187.700	1 Paket	7.776.250			
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1 Laporan	4.500.000	1 Laporan	1.548.750			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	70.611.000	1 Laporan	25.923.410			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	8 Unit	56.940.000	6 unit	48.500.000			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 Unit	56.940.000	6 unit	48.500.000			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	3 Laporan	1.154.138.400	3 Laporan	1.132.665.159			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.991.000	1 Laporan	1.810.000			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	213.000.000	1 Laporan	191.707.759			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	939.147.400	1 Laporan	939.147.400			

				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	30 unit	971.938.956	30 unit	791.914.756			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	750.088.872	20 unit	611.019.572			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	76 unit	50.000.000	21 unit	9.540.000			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	171.850.084	3 unit	171.355.184			
2				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang bankable	86,50 Persen	259.249.380	86,50 persen	242.297.825			
				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha	12 unit usaha	20.636.000	12 unit usaha	12.107.250			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 Satu Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	12 unit usaha	20.636.000	12 unit usaha	12.107.250			

				Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang membuka kantor cabang pembantu	3 unit usaha	238.613.380	3 unit usaha	230.190.575			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Satu Daerah Provinsi	3 unit usaha	238.613.380	3 unit usaha	230.190.575			
3				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat dan Berkualitas	74,06 Persen	46.919.800	74,06 persen	23.683.900			
				Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP yang akuntabel	55 unit usaha	17.119.800	15 unit usaha	11.299.750			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	55 unit usaha	17.119.800	15 unit usaha	11.299.750			

				Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP yang tumbuh sehat dan mandiri	35 unit usaha	29.800.000	14 unit usaha	12.384.150			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat kepada Anggota KUKM dan Masyarakat	35 unit usaha	29.800.000	14 unit usaha	12.384.150			
4				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	87,22 Persen	118.491.392	45,22 persen	104.836.292			
				Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP yang tumbuh sehat dan mandiri	100 unit usaha	118.491.392	71 unit usaha	104.836.292			
				Sub Kegiatan Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai kesehatannya	100 unit usaha	118.491.392	71 unit usaha	104.836.292			
5				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi/Koperasi Tenun/Koperasi Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	3,13 Persen	316.561.180	3,13 persen	297.374.467,00			

				Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	124 unit usaha	316.561.180	124 unit usaha	297.374.467			
				Sub Kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang memenuhi standarisasi dan restrukturisasi usaha	60 unit usaha	200.525.888	60 unit usaha	188.262.183			
				Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	64 unit usaha	116.035.292	64 unit usaha	109.112.284			
6				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang bankable	1,13 Persen	822.315.360	24,79 Persen	672.551.385			
				Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang meningkat kelas usahanya	195 UKM	822.315.360	195 UKM	672.551.385			

			Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	195 UMKM	822.315.360	195 UMKM	672.551.385			
		UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI				4.376.912.578		4.215.375.168			
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	414.194.572	82,69 Nilai	353.653.356			
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	4.077.900	1 Layanan	3.676.000			
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	666.400	1 paket	661.000			
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.725.900	1 paket	2.479.000			
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	685.600	1 paket	536.000			

				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	3 laporan	236.264.584	3 laporan	201.816.368			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.001.000	1 laporan	910.000			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	48.500.000	1 laporan	14.342.784			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	186.763.584	1 laporan	186.563.584			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	3 unit	173.852.088	3 unit	148.160.988			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Jenis	95.870.296	1 unit	71.419.196			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Jenis	2.850.000	1 unit	1.610.000			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	75.131.792	1 unit	75.131.792			
2				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	0,3 Persen	3.962.718.006	100 persen	3.861.721.812			

				Kegiatan Pendidikan dan Latihan bagi Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Pengelola KUMKM yang berkompeten	20 Orang	3.962.718.006	559 orang	3.861.721.812			
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	50 Orang	3.962.718.006	559 orang	3.861.721.812			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan proses evaluasi yang dilakukan terhadap berbagai aspek dalam penyediaan layanan publik oleh suatu perangkat daerah yang mencakup evaluasi efektivitas, efisiensi, kualitas, dan dampak dari layanan yang diberikan. Analisis Kinerja ini berdasarkan atas laporan Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2023 yang didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan terhadap kegiatan Tahun Anggaran 2023, dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek input, output dan *outcome* yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. Selain itu pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap sasaran strategis dengan mengukur pencapaian indikator sasaran yang telah ditargetkan dibandingkan dengan realisasinya. Pengukuran terhadap kinerja kegiatan dituangkan ke dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Kinerja keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp21.543.645.124 (Dua puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp19.378.257.240 (sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) atau 98,97% sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.7 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	Persentase KUMKM Menuju Digital	25,25%	25,64%	101%	26,50 %	26,62%	100 %

a	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	6,85%	6,44%	94%	7,50%	10,12%	134%
b	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	9,56%	9,99%	104%	2,90%	3,50%	120%

Catatan: Indikator Rasio Kewirausahaan yang semula targetnya 9,57% berubah menjadi 2,90% dikarenakan terdapat penyesuaian data UMKM sehingga target Rasio Kewirausahaan harus dirubah menyesuaikan kondisi terkini

Pada tabel diatas dapat diketahui pencapaian target dari Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan kategori **Sangat Baik**. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2023 sudah sangat baik. Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali dengan indikator “Persentase KUMKM Menuju Digital”, target tahun 2023 adalah 26,50% dan realisasinya 26,62% dengan kategori **Sangat Baik**. Dapat dijelaskan tujuan digitalisasi KUMKM adalah upaya untuk mengubah cara kerja manajemen koperasi pada umumnya menjadi manajemen koperasi secara digital, hal ini akan mempermudah koperasi dalam menjalankan bisnisnya, dan juga dalam memberikan pelayanan bagi seluruh anggotanya melalui Aplikasi Koperasi Digital dan bagi UMKM adanya digitalisasi koperasi akan mempermudah para UMKM untuk mencari tambahan modal dalam pengembangan usahanya, digitalisasi koperasi memberikan kemudahan serta kenyamanan dalam pengajuan pinjaman modal tanpa harus berurusan dengan bank yang biasanya memiliki bunga yang tinggi.

Selain itu, adanya digitalisasi koperasi akan membuat transparansi penyaluran dana serta catatan mengenai keanggotaan lebih mudah dan jauh lebih aman untuk diakses, pelayanan yang diberikan koperasi kepada para anggotanya pun jauh lebih mudah dengan adanya digitalisasi koperasi. Serta adanya digitalisasi koperasi akan memudahkan dalam menghubungkan antara pelaku UMKM dengan pembelinya melalui aplikasi berbasis digitalisasi, yang mana dengan adanya hal tersebut para pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas ekonominya dan produksinya. Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam digitalisasi Koperasi dan UMKM adalah membentuk ekosistem Koperasi dan UMKM yang berkualitas dan sehat

dalam menjangkan kegiatan dan usahanya dengan cara baru dan Manajemen Tata Kelola Koperasi yang baik (*Good Corporate Governance*) serta memiliki daya saing dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Realisasi indikator sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2023 “Persentase peningkatan produktivitas koperasi” adalah 10,12% dari target sebesar 7,50% dengan persentase pencapaian sasaran strategis adalah sebesar 134%. Peningkatan produktivitas koperasi adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar pelaku usaha. Melalui pembinaan dan pengembangan sektor koperasi diharapkan upaya peningkatan usaha ekonomi produktif akan lebih efisien dan dapat mencapai target yang telah ditentukan. Capaian ini bisa diwujudkan dengan melakukan aktivitas melaksanakan temu konsultasi dengan lembaga keuangan Bank dan Nonbank, sosialisasi dan pemanfaatan KUR dan skim-skim kredit lainnya.

Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri dengan indikator “Rasio Kewirausahaan”, target tahun 2023 adalah 2,90% dengan realisasi 3,50% dengan kategori **Sangat Baik**. Upaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam meningkatkan Rasio wirausaha sehingga usaha UMKM dapat berkembang dan berkelanjutan adalah:

1. Transformasi pertumbuhan wirausaha produktif dengan membina setiap orang yang memiliki jiwa dan menjalankan kewirausahaan untuk menciptakan ekosistem dan mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan dalam membentuk struktur usaha yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
2. Transformasi digital dan pemanfaatan teknologi dalam menjalankan aktivitas usahanya dengan masuk ke dalam ekosistem digital seperti market place, *e-commerce* atau *platform* digital lainnya.
3. Transformasi usaha informal ke formal dengan memfasilitasi UMKM untuk memperoleh izin usaha yang lengkap, memiliki sertifikasi dan standardisasi usaha, dan dapat mengakses pembiayaan formal.

Tabel 2.9 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	Persentase KUMKM Menuju Digital	N/A	N/A	25,25	26,50	N/A	N/A	25,64	26,62
a	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	5,57	6,27	6,85	7,50	8,35	9,17	6,44	10,12
b	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	N/A	8,38	9,56	2,90	N/A	9,55	9,99	3,50

Pada tabel diatas adalah perbandingan capaian pada 3 (tiga) tahun terakhir pada level tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali pada tahun 2023. Jika dilihat dari realisasi dan capaiannya sudah sangat memenuhi target yang telah ditetapkan atau dengan kategori **Sangat Baik**. Data-data yang kosong merupakan bentuk penyesuaian indikator hasil review SAKIP, sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian indikator kinerja pertahunnya.

Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan pada setiap indikator tujuan dan sasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Digitalisasi KUMKM merujuk pada penggunaan teknologi digital dan *platform online* untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas usaha kecil, menengah, dan mikro. Inisiatif digitalisasi ini bertujuan untuk membantu KUMKM mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, meningkatkan akses mereka terhadap pasar, memperluas jangkauan, dan meningkatkan efisiensi operasional, dicapai melalui pendampingan tata kelola koperasi yang modern dan professional, fasilitasi akses pasar dan kemitraan dengan berbagai stakeholder yang relevan (*off taker/buyer*), dan fasilitasi sarana promosi dan kemitraan bagi UKM melalui pameran dan digitalisasi.

- b. Peningkatan Produktivitas Koperasi dapat dicapai dikarenakan adanya, Penguatan Literasi Keuangan melalui Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi, Pembentukan Koperasi Produksi, Pendampingan dan Pemberdayaan Koperasi serta Program Penguatan Kelembagaan (Koperasi), kemitraan dan jaringan dengan pemerintah dan sektor swasta, dan permodalan usaha.
- c. Rasio Kewirausahaan dalam rangka pembentukan jumlah bisnis baru yang didirikan melalui pengembangan kewirausahaan lewat dunia pendidikan, peningkatan kapasitas lembaga inkubator, perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha dan startup, dan penyelenggaraan pendampingan dan konsultasi bisnis melalui PLUT KUMKM untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang positif, serta mencerminkan atmosfer yang kondusif bagi kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan.

Tabel 2.10 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RENSTRA

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET AKHIR 2023	CAPAIAN	TINGKAT KEMAJUAN
1	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	Persentase KUMKM Menuju Digital	26,62	26,50	100%	Sudah Tercapai
a	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	10,12	7,50	134%	Melebihi Target
b	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	3,50	2,90	120%	Belum Mencapai Target

Dari tabel di atas dapat diketahui perbandingan capaian IKU tahun 2023 dengan Target Akhir RENSTRA Tahun 2023. Dapat diketahui bahwa pencapaian indikator Rasio Kewirausahaan belum mencapai target dimana terdapat perubahan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang semula targetnya 9,57% berubah menjadi 2,90% dikarenakan terdapat penyesuaian data UMKM sehingga target Rasio Kewirausahaan harus dirubah menyesuaikan kondisi terkini dan

menyebabkan pencapaian target sesuai target akhir RENSTRA tidak tercapai secara optimal.

Tabel 2.11 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Peningkatan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan pada Tahun 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	Persentase KUMKM Menuju Digital	26,50	26,62	100%	Digitalisasi KUMKM dapat dicapai dikarenakan adanya, pendampingan tata kelola koperasi yang modern dan professional dan fasilitasi sarana promosi dan kemitraan bagi UKM melalui pameran dan pelatihan digital, penjualan online, penggunaan alat teknoogi, pemanfaatan media sosial dan penggunaan alat pembayaran digital oleh UMKM	-
a	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	7,50	10,12	134%	Peningkatan Produktifitas Koperasi dapat dicapai dikarenakan adanya, Penguatan Literasi Keuangan melalui Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi dan Program Penguatan Kelembagaan (Koperasi) dan Permodalan Usaha , kemitraan dan jaringan dengan pemerintah dan sector swasta	Mensejahterakan anggota koperasinya, yang dapat dilakukan dengan pemberian pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan anggota koperasi yang bergerak di sektor IUMKM
b	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	2,90	3,50	120%	Rasio Kewirausahaan meningkat dikarenakan adanya, pengembangan kewirausahaan melalui dunia pendidikan, peningkatan kapasitas lembaga inkubator, perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha dan startup, dan penyelenggaraan pendampingan dan konsultasi bisnis melalui PLUT KUMKM	

Tabel 2.12 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	Persentase KUMKM Menuju Digital	26,50	26,62	100%	21.486.705.124	19.329.757.240	89,96	0,99
2	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	7,50	10,12	134%	741.221.752	475.654.309	64	0,99
3	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	2,90	3,50	120%	4.785.033.366,00	4.534.273.197	95	0,99

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Tabel 2.13 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	Persentase KUMKM Menuju Digital	100	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang bankable	100%	Menunjang
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				Jumlah koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha	12 Unit	Menunjang	
Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 Satu Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	12 Unit	Menunjang	

				Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang membuka kantor cabang pembantu	3 Unit	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Satu Daerah Provinsi	3 Unit	Menunjang
2	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel		134	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	45,22%	Menunjang
				Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP yang tumbuh sehat dan mandiri	71 Unit	Menunjang
				Sub Kegiatan Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai kesehatannya	71 Unit	Menunjang
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat dan Berkualitas	100%	Menunjang
				Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP yang akuntabel	15 Unit	Menunjang
				Sub Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	15 Unit	Menunjang

				Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu)	Jumlah KSP/USP yang tumbuh sehat dan mandiri	14 Unit	Menunjang
				Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	14 Unit	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi/Koperasi Tenun/Koperasi Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	100%	Menunjang
				Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Nivo Koperasi yang didampingi	124 Kop	Menunjang
				Sub Kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang memenuhi standarisasi dan restrukturisasi usaha	124 Kop	Menunjang
				Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	124 Kop	Menunjang
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	100%	Menunjang
				Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Pengelola KUMKM yang berkompeten	559 Org	Menunjang

				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	559 Org	Menunjang
3	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	120	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang bankable	24,79%	Menunjang
				Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang meningkat kelas usahanya	195 UMKM	Menunjang
				Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	195 UMKM	Menunjang

Pencapaian Tujuan dan indikator tujuan tentunya juga didukung oleh 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

a. Peningkatan Produktivitas Koperasi

Pasal 33 UUD 1945 menempatkan koperasi sebagai pilar dan tulang punggung perekonomian nasional. Agar berfungsi secara optimal sebagai pilar dan tulang punggung perekonomian, koperasi harus dikelola secara efisien dan produktif. Tingkat produktivitas koperasi, peningkatan efisiensi murni harus diprioritaskan, diikuti dengan peningkatan efisiensi skala dan efisiensi teknis. Koperasi harus memberikan pelatihan reguler untuk staf mereka, manajemen profesional, mengadopsi teknologi canggih, dan memperbesar ukurannya dengan menggabungkan koperasi kecil menjadi entitas yang lebih besar. Indikator program (sesuai dengan RENSTRA 2018-2023) yang mendukung pada sasaran strategis kesatu adalah:

1. Persentase Koperasi yang Bankable. Target kinerja ini di tahun 2023 adalah 86,5 dengan Capaian 100%.

2. Persentase koperasi/koperasi tenun/koperasi subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta. Target kinerja ini di tahun 2023 adalah 3,13 dengan capaian 100%.
3. Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas. Target kinerja ini di tahun 2023 adalah 87,2 dengan realisasi 45,22%.
4. Persentase Koperasi yang Sehat dan Berkualitas. Target kinerja ini tahun 2023 adalah 74,06 dengan realisasi 100%.

b. Rasio Kewirausahaan

Pengertian kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Kewirausahaan dan wirausaha sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan dan produk yang diperlukan masyarakat.

Capaian sasaran strategis kedua pada tabel 3.7 dapat ditunjukkan pada tahun 2023 target 2,90 dengan capaiannya adalah 120% dan termasuk pada kategori Baik, jika dibandingkan dengan tahun 2022. Indikator program (sesuai dengan RENSTRA 2018-2023) yang mendukung pada sasaran strategis kedua adalah:

1. Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat. Target kinerja ini di tahun 2023 adalah 0,30 dengan capaian melebihi 100%.
2. Persentase UMKM yang bankable. Target kinerja ini di tahun 2023 adalah 1,13 dengan capaian 24,79% yang terjadi akibat keterlambatan pengumpulan dan validasi data UMKM.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada tahun anggaran 2023, di dukung dengan Anggaran Perubahan sebesar Rp21.486.705.124 (Dua puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.14 Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	259.249.380	242.297.825	93,46
a	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.636.000	12.107.250	58,67
	Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.636.000	12.107.250	58,67
b	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	238.613.380	230.190.575	96,47
	Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	238.613.380	230.190.575	96,47
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	46.919.800	23.683.900	50,48
a	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.119.800	11.299.750	66,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	17.119.800	11.299.750	66,00

b	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	29.800.000	12.384.150	41,56
	Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	29.800.000	12.384.150,00	41,56
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	118.491.392	104.836.292	88,48
a	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	118.491.392	104.836.292	88,48
	Sub Kegiatan Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	118.491.392	104.836.292	88,48
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	316.561.180	104.836.292,00	33,12
a	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	316.561.180	297.374.467	93,94
1	Sub Kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	200.525.888	188.262.183	93,88
2	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	116.035.292	109.112.284,00	94,03
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	822.315.360,00	672.551.385,00	81,79
a	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	822.315.360,00	672.551.385,00	81,79

	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	822.315.360,00	672.551.385,00	81,79
6	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	3.962.718.006	3.861.721.812	97,45
a	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.962.718.006	3.861.721.812	97,45
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	3.962.718.006	3.861.721.812	97,45
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.603.195.434	13.822.138.203	88,59
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.196.792	80.593.317	99,26
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.873.292	78.344.117	99,33
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.323.500	2.249.200	96,80
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.142.384.786	11.632.298.785	88,51
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.142.384.786	11.632.298.785	88,51
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.596.500	136.166.186	69,26
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.100	9.895.000	98,96
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.298.700	36.622.776	82,67
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000	54.400.000	98,91
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.187.700	7.776.250	63,80
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	4.500.000	1.548.750	34,42
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.611.000	25.923.410	36,71
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.940.000	48.500.000	85,18

	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.940.000	48.500.000	85,18
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.154.138.400	1.132.665.159	98,14
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.991.000	1.810.000	90,91
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.000.000	191.707.759	90,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	939.147.400	939.147.400	100,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	971.938.956	791.914.756	81,48
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750.088.872	611.019.572	81,46
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	9.540.000	19,08
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171.850.084	171.355.184	99,71

Realisasi anggaran pada tahun 2023 pada 7 (tujuh) program tersebut di atas hampir memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sudah BAIK.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, dan Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi Bali sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan identifikasi masalah tersebut di atas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

- a. Peningkatan ekspor;
- b. Penguatan substitusi impor;
- c. UMKM dan Koperasi masuk dalam rantai pasok global (Global Value Chain).

Isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali antara lain:

- a. Belum optimalnya jaringan kemitraan Koperasi dan UMKM;
- b. Sebagian besar pelaku UMKM merupakan pelaku mikro;

- c. Rendahnya kompetensi SDM pengelola koperasi dan rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku UMKM;
- d. Rendahnya daya saing, produktivitas dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM;
- e. Belum ada peta data perkembangan usaha Koperasi dan UMKM yang komprehensif dan terkini.

Adapun Isu-isu yang berkembang berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola yang menyebabkan koperasi tidak mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya;
- b. Rendahnya pertumbuhan Koperasi dan UKM sebagai akibat dari rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat Bali yang masih beranggapan lebih baik mencari kerja daripada menciptakan lapangan pekerjaan;
- c. Kurangnya Koperasi dan UKM yang mendapat akses permodalan yang menyebabkan kesulitan dalam pengembangan usaha;
- d. Terbatasnya pemasaran produk dan kemitraan Koperasi dan UKM sehingga peluang pengembangan usaha dan inovasi produk menjadi kecil yang mengakibatkan Koperasi dan UKM jalan di tempat.

Dari isu strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali telah mampu mengatasi hal yang kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat daerah yaitu :
 - Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat dengan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi dalam mendukung ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Koperasi yang sehat memiliki potensi untuk memberdayakan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mempromosikan inklusi keuangan, dan mengurangi kesenjangan sosial.
 - Meningkatkan penumbuhan dan pengembangan KUKM dengan melaksanakan penguatan Tata Kelola, penyuluhan perkoperasian, bimtek/diklat perkoperasian dan kewirausahaan serta peningkatan akses informasi mengenai permodalan, pemasaran produk hasil Koperasi dan UKM, serta pengembangan jaringan dan kemitraan

- Meningkatkan dalam memfasilitasi akses permodalan dan fasilitasi pameran dalam kemitraan usaha dengan BUMD/BUMN
- b) Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah adalah
Keberadaan dan peran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, terutama dalam menggerakkan sektor riil merupakan realitas dalam kegiatan ekonomi nasional yang sangat penting dan strategis. Hal ini terbukti oleh penguatan terhadap ekonomi skala kecil dan menengah dipandang menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan untuk menopang ekonomi nasional yang kuat dan terciptanya fundamental ekonomi yang tangguh. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengembangan dan pemberdayaan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maka keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan terhadap peningkatan kualitas koperasi, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah (UKM). Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor koperasi dan UKM menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUMKM	Aspek Kelembagaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya aspek kelembagaan KUMKM 2. Rendahnya pengawasan akuntabilitas kinerja KUMKM 3. Rendahnya Akses Informasi perkoperasian dan UMKM 4. Belum adanya peta data dan perkembangan usaha koperasi yang komprehensif dan terkini 5. Belum optimalnya pendampingan kelembagaan koperasi dan UMKM
	Rendahnya kompetensi SDM pengelola Koperasi dan rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku UMKM	Aspek Sumber Daya Manusia <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kapasitas pengelola koperasi dan UMKM 2. Minimnya jumlah kaum muda di Bali tertarik dengan koperasi 3. Kurangnya Penguasaan Teknologi
	Terbatasnya akses pembiayaan bagi KUMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya informasi layanan perbankan / lembaga keuangan yang dimanfaatkan Koperasi dan KUMKM 2. Rendahnya kapabilitas KUMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan 3. Skema pembiayaan/pendanaan KUMKM masih terbatas pada sumber –sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan berbasis investasi
	Rendahnya Produktifitas, daya saing dan pemasaran produk KUMKM	Aspek Produksi, restrukturisasi usaha dan pemasaran <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya Kapasitas dan kualitas produksi 2. Produk KUMKM belum memenuhi standarisasi 3. Belum optimalnya jaringan pemasaran dan kemitraan KUMKM 4. Belum optimalnya integrasi pemasaran hasil usaha mikro maupun home industri berbasis ekonomi digital dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional

- c) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals) : Program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 yang memiliki catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program tahun yang direncanakan, sehingga ada beberapa program prioritas di tahun 2025 dalam upaya memberikan kontribusi yang berarti dalam membuka lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan serta memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi daerah yang berdampak di berbagai sektor.
- d) Tantangan dan peluang dalam Pengembangan pelayanan Perangkat Daerah : terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh koperasi dalam era digital ini, sebagai berikut:
1. Sumber Daya Manusia
 - a. Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional.
 - b. Minimnya jumlah kaum muda di Bali yang tertarik dengan koperasi. Hal ini disebabkan karena model koperasi yang dinilai kurang adaptif dan modern, dijalankan oleh orang-orang tua, dan dianggap kurang inovasi. Hal ini berdampak pada tata kelola koperasi yang kurang mengikuti perkembangan atau belum sepenuhnya menggunakan teknologi dan model bisnis yang lebih selaras dengan perkembangan. Oleh karenanya, koperasi harus mampu menarik minat kaum muda sebagai target yang potensial agar masuk ke dalam ekosistem koperasi dan memberikan sentuhan inovasi serta kreativitas yang dapat menjadi modal bagi koperasi untuk memiliki daya saing maupun inisiatif model bisnis baru. Selain itu, para kaum muda yang masuk ke dalam ekosistem koperasi dapat mempercepat proses regenerasi SDM koperasi.
 2. Kelembagaan

Saat ini, jenis koperasi didominasi oleh koperasi simpan pinjam (credit union), koperasi konsumsi, dan koperasi produksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dapat dilihat dari sisi kebutuhan konsumen dari bisnis yang dijalankan oleh koperasi, dimana jenis Koperasi Simpan Pinjam yang

menyediakan jasa modal maupun dana bagi anggotanya dipandang lebih diminati. Hal yang sama berlaku bagi Koperasi Konsumen dan Koperasi Produksi yang lebih mudah dijalankan dan memiliki pangsa pasar yang dapat dijangkau, serta tidak membutuhkan modal yang besar jika dibandingkan dengan jenis koperasi yang lain.

Dari sisi kelembagaan, khususnya pada saat pembentukan koperasi dan pembuatan akta, baik anggota maupun pengurus koperasi tidak mengalami kesulitan karena prosedur yang mudah. Akan tetapi, kesulitan mulai dihadapi saat ingin memasuki lingkup bisnis yang lebih besar. Hal tersebut dikarenakan pengurusan izin dengan otoritas terkait yang menurunkan motivasi dan kreativitas untuk mengembangkan kelembagaannya. Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial, dan belum memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

3. Pembiayaan

Perluasan akses dan skema pembiayaan /pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan berbasis investasi

4. Produksi dan Pemasaran

Pada umumnya sistem produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisiensikan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM, serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat, Koperasi dan UKM dapat disebut sebagai gambaran pondasi dasar ekonomi bangsa Indonesia karena mempunyai dasar azas kekeluargaan, akan tetapi kondisi saat ini tidak mudah menjalankan kegiatan perkoperasian di Indonesia. Lingkungan dihadapi koperasi pun beragam pada era globalisasi ini yang kemudian dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu analisis internal dan analisis eksternal.

- a. Analisis Internal
- Kekuatan (*strength*)
 - Adanya Peraturan Perundang-undangan dibidang Perkoperasian dan UKM.
 - Bali sebagai Provinsi Penggerak Koperasi menunjukkan bahwa koperasi memegang peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian daerah.
 - Kelemahan (*Weakness*)
 - Kualitas SDM pengelola koperasi masih rendah.
 - Akses permodalan Koperasi dan UKM masih kurang.
 - Pemasaran produk dan kemitraan Koperasi dan UKM terbatas.
 - Masih tingginya orientasi pendirian Koperasi Simpan Pinjam
- b. Analisis Eksternal
- Peluang (*Oppurtunity*)
 - Adanya pelatihan manajemen Pengelolaan Koperasi dan UMKM.
 - Adanya fasilitasi/sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan/pembiayaan.
 - Adanya fasilitasi pengembangan jaringan/kemitraan usaha dan promosi produk unggulan koperasi.
 - Ancaman (*Treath*)
 - Adanya kasus-kasus koperasi dan koperasi tidak aktif.
 - Adanya gangguan dari para tengkulak.
- c. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :
- Program dan kegiatan direncanakan/disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi.
 - Program dan kegiatan disusun disesuaikan dengan kesanggupan APBD Daerah.
 - Penyesuaian indikator kinerja program sesuai hasil kinerja yang diinginkan

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Penyusun Rancangan Awal Renja dilakukan review Rancangan RKPD. Dengan melakukan review terhadap RKPD dengan memperhatikan poin-poin di atas, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan tersebut, serta memberikan masukan yang berharga untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas implementasi program-program pembangunan daerah. Dalam review terhadap Rancangan RKPD diuraikan sebagai berikut : proses dilakukakn yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terutama hasil capaian kinerja tahun 2023 dan kebutuhan tahun 2025. Alasan proses tersebut dilakukan untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan serta menyesuaikan antara kinerja program dan kegiatan, kemampuan keuangan serta kebutuhan program dan kegiatan tahun 2025.

Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Akhir RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan Provinsi Bali Tahun 2025, tidak perlu mengusulkan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam Rancangan Awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda (Lampiran 2 Tabel 2.8).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Forum Perangkat Daerah Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024, ada beberapa usulan masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut : hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut:

1. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis dimasukan dalam daftar panjang;
2. Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek.

Tabel 2.15
Usulan Program/Kegiatan Tahun 2025 dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi Bali

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	program untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen operasional UMKM, meningkatkan kompetensi pengelola dan karyawan UMKM, meningkatkan literasi <i>e-commerce, internet of things (IoT)</i> dan digitalisasi, meningkatkan kualitas database UMKM (berapa yang lahir, berapa yang <i>survive</i> , bagaimana perkembangan usahanya) dan hal yang sama berlaku untuk koperasi	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan yang disampaikan pada saat forum Perangkat Daerah sudah terakomodir pada beberapa Program yang ada pada Dinas, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali berkolaborasi dalam dengan pihak terkait dalam hal ini Bank Penyalur KUR, Kemenkumham, Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi, Perangkat Daerah dan stakeholder untuk peningkatan Pelaku UMKM baik produk maupun kompetensi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Terkait dengan arah kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional serta prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali serta isu strategis yang berkembang, maka ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sehingga ada keterpaduan antara prioritas pembangunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali menjawab dengan program unggulan yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- c. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- g. Program Pengembangan UMKM

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tidak terlepas dari visi, misi Pemerintah Republik Indonesia, cita-cita dan acuan pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tujuan Pembangunan Daerah beserta program-program yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun ke depan. Adapun tujuan pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) adalah meningkatkan kinerja dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) serta Kewirausahaan sehingga mampu tumbuh menjadi usaha

yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka kemandirian perekonomian daerah dengan indikator Persentase KUMKM Menuju Digital.

Berdasarkan tujuan di atas, dikembangkanlah 2 (dua) sasaran beserta indikator yaitu:

- a. Sasaran 1 : Terwujudnya Koperasi Yang Berkualitas dan Modern
Indikator : Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
- b. Sasaran 2 : Terwujudnya Umkm Dan Wirausaha Yang Berdaya Saing dan Produktif
Indikator : Rasio Kewirausahaan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan perlu dikembangkan untuk mencapai 2 (dua) sasaran tersebut. Adapun Program/Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali setelah dilakukan analisis sesuai dengan kemampuan keuangan serta kebutuhan program/kegiatan dan Sub Kegiatan dengan menyesuaikan pagu indikatif yang diberikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
e.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
f.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
a.	Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
2.	Kegiatan Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
a.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
III.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
1	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
a.	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
2	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
a.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
IV.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
1.	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
a.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
b.	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha
V.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

1.	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
a.	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
b.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
VI.	Program Pengembangan UMKM
1.	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah
a.	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
b.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
c.	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
d.	Sub Kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil
VII.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
1.	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
a.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
	JUMLAH PROGRAM: 7
	JUMLAH KEGIATAN: 15
	JUMLAH SUB KEGIATAN: 30

Berdasarkan tabel di atas Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 berjumlah 7(tujuh) terdiri dari 6 (enam Program Prioritas dan 1 (satu) program rutin, kegiatan berjumlah 15 (lima belas), dan sub kegiatan berjumlah 30 (tiga puluh).

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2025 dengan nominal pagu indikatif sebesar Rp18.327.335.849 (delapan belas milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian anggaran per program/kegiatan/sub kegiatan disajikan terlampir. Adapun skala Prioritas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam penentuan pagu anggaran sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.1
Skala Prioritas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam penentuan Pagu Anggaran sebagaimana tabel berikut:**

NO	PERANGKAT DAERAH	GAJI DAN TUNJANGAN (ASN)	GAJI DAN THR TENAGA KONTRAK	KESEKRETARIATAN (Fixed Cost)	KESEKRETARIATAN (Penunjang)	BELANJA PRIORITAS	TOTAL
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	13.007.778.019	2.524.703.380	1.397.854.450	397.000.000	1.000.000.000	18.327.335.849

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program/kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu yang telah ditetapkan sampai pada tahap penetapan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025 dan ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan tidak mendapat alokasi pendanaan akan diadakan penyesuaian terhadap target yang pada saat penyusunan berdasarkan pagu indikatif tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2025 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yang menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya, menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.
- c. Partisipasi masyarakat dalam hal ini pelaku Koperasi dan UKM serta *stakeholder* (asosiasi, perguruan tinggi, lembaga keuangan) dalam proses penyusunan program dan kegiatan melalui Forum Penyelenggaraan Perangkat Daerah

ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan pelaku Koperasi dan UKM.

- d. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang menggambarkan sinergitas program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.

2. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025 antara lain:

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali terdapat 7 (tujuh) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan nominal pagu indikatif sebesar Rp18.327.335.849 (delapan belas milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).

3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Lampiran 1

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						17.689.467.539								21.422.500.000	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.698.467.539								21.422.500.000	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						17.698.467.539								21.422.500.000	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)</i>	-			82.38 Nilai	15.969.460.459						-	18.052.500.000		
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			3 Dokumen	158.046.420			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, Dokumen Perencanaan	-	160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	

	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	148.046.420	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, Dokumen Perencanaan	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	10.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, Dokumen Perencanaan	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			1 Dokumen	13.007.778.019			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	13.500.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				67 Orang/ Bulan	13.007.778.019	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	13.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	20.000.000			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN	-	30.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	20.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN		30.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	314.739.820			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	-	357.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		15.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	41.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		60.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	76.071.194	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	125.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	21.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	25.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	4.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	7.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	60.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	125.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Dokumen	125.000.000			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BMD	-	500.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	125.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BMD		500.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			2 Dokumen	1.426.117.530,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD	-	1.530.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD		5.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	246.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD		325.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	917.007.080	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD	1.200.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			2 Dokumen	1.279.057.746			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD	1.975.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				18 Unit	781.574.980	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD	950.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				76 Unit	50.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD	150.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>			3 Unit	447.482.766	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD	875.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2,	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	<i>Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP</i>	-		3.70 Persen	243.046.420						350.000.000	
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan</i>	-		10 Unit Usaha	223.046.420			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi	250.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												
			<i>Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam</i>			10 Unit Usaha	223.046.420	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi	250.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

								Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan</i>	-		1 Unit Usaha	20.000.000			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi	-	100.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
			<i>Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam</i>			1 Unit Usaha	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi		100.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3,	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	<i>Persentase koperasi berkualitas</i>	-		7.00 Persen	187.682.140						-	250.000.000	

2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi</i>	-			90 Unit Usaha	50.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi	-	75.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
		<i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i>				90 Unit Usaha	50.000.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi		75.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi</i>	-			70 Unit Usaha	137.682.140			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi	-	175.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
		<i>Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>	-			70 Unit Usaha	137.682.140	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi	-	175.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

4,	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	<i>Persentase koperasi yang mendapat Pembiayaan dan Bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta</i>	-		3,30 Persen	200.364.280					-	600.000.000		
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	-		164 Unit Usaha	200.364.280			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi	-	600.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha													
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha</i>			84 Unit Usaha	150.364.280	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi		250.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>Jumlah Usaha Kecil yang Diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>			205 Unit Usaha	678.585.680			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM	950.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan												
		<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan</i>			205 Unit Usaha	602.185.680	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM	950.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan												

			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan</i>			100 Orang	76.400.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM	200.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	-	-	419.328.560						-	1.020.000.000	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	<i>Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah</i>			145 Unit Usaha	419.328.560			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM	1.020.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	

	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi													
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi</i>				110 Unit Usaha	219.328.560	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM	250.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM													
			<i>Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum</i>				35 Orang	50.000.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM	270.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

								Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		melalui Peran Aktif Koperasi					
	2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan													
			<i>Wirausaha yang Difasilitasi</i>			100 Orang	100.000.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM		250.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

									Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					
	2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil												
			<i>Jumlah Usaha Kecil yang Terasilitasi</i>			10 Unit Usaha	50.000.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM	250.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH					628.868.310						8.770.500.000	

	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					628.868.310						8.770500.000	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					628.868.310						8.770500.000	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)			82.38 Nilai	453.504.030						670.500.000	
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		2 Dokumen	64.404.050			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	-	84.000.000 UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	700.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	1.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	2.800.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	5.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	56.904.050	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	50.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Baramg Cetak dan Penggandaan													
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	1.500.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	1.500.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	2.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	25.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				2 Dokumen	207.728.560					7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	251.500.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	1.500.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan</i>				1 Laporan	48.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	50.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan</i>				1 Laporan	158.228.560	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	200.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				2 Dokumen	181.371.420					7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN	335.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan</i>				1 Unit	94.007.140	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN	150.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				3 Unit	2.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN	35.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	85.364.280	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN	150.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Persentase Pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi</i>				25,00 Persen	175.364.280						8.100.000.000	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					410 Orang	175.364.280			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, Pengelola Koperasi, UMKM	8.100.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi													

			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>			410 Orang	175.364.280	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, Pengelola Koperasi, UMKM	8.100.000.000	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
			JUMLAH				18.327.335.849						30.193.000.000	

Lampiran 2

Tabel 2.8 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Bali Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	82,38 Nilai	18.990.447.416	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	82,38 Nilai	15.969.460.459	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen	129.814.420	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	3 dokumen	158.046.420	
a.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	122.914.420	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	148.046.420	
b.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	6.900.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	10.000.000	

2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen	13.007.778.019	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen	13.007.778.019	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	67 orang	13.007.778.019	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	67 orang	13.007.778.019	
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 dokumen	20.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 dokumen	20.000.000	
a.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	4 orang	20.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	4 orang	20.000.000	
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	2 dokumen	314.739.820	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	2 dokumen	214.571.194	
a.	Sub Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	11.498.965	Sub Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	11.000.000	

b.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	57.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	41.500.000	
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	1 paket	109.250.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	76.071.194	
d.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	14.015.855	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	21.500.000	
e.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1 laporan	5.175.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1 laporan	4.500.000	
f.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	117.300.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	60.000.000	
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 dokumen	400.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 dokumen	125.000.000	

a.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20 Unit	400.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	125.000.000	
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 dokumen	1.426.117.530	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1.165.007.080	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	2.289.650	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	2.000.000	
b.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	311.880.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	246.000.000	
c.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1.111.947.880	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	917.007.080	
6.	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 dokumen	3.691.997.627	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 dokumen	1.279.057.746	

a.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 unit	920.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 unit	781.574.980	
b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	76 unit	143.750.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	76 unit	50.000.000	
c.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	2.628.247.627	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	447.482.766	
B.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP	3,70%	293.450.700	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP	3,70%	243.046.420	
1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi		Jumlah izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan	10 unit usaha	218.410.700	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi		Jumlah izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan	10 unit usaha	223.046.420	
a.	Sub Kegiatan Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua	Jumlah Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	10 unit usaha	218.410.700	Sub Kegiatan Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua	Jumlah Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	10 unit usaha	223.046.420	

	dalam 1 (satu) daerah Provinsi	kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	yang memiliki usaha simpan pinjam			Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	yang memiliki usaha simpan pinjam			
--	--------------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---	--	-----------------------------------	--	--	--

2.	Kegiatan Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.		Jumlah izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperai dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan	1 unit usaha	75.040.000	Kegiatan Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.		Jumlah izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperai dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan	1 unit usaha	20.000.000	
a.	Sub Kegiatan Fasilitas Izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Semua kota/kab, semua kecamatan, semua kel/desa	Jumlah koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang memiliki usaha simpan pinjam	1 unit usaha	74.040.000	Sub Kegiatan Fasilitas Izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Semua kota/kab, semua kecamatan, semua kel/desa	Jumlah koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang memiliki usaha simpan pinjam	1 unit usaha	20.000.000	
C.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase koperasi berkualitas	7,00%	175.363.380	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase koperasi berkualitas	7.00%	187.682.140	

1.	Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.		Jumlah koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	90 unit usaha	49.999.500	Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.		Jumlah koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	90 unit usaha	50.000.000	
a.	Sub Kegiatan Penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	90 unit usaha	49.999.500	Sub Kegiatan Penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	Kab. Badung, (semua Kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	90 unit usaha	50.000.000	

		kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)									
2.	Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.		Jumlah Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diperiksa dan diawasi	70 unit usaha	125.363.880	Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.		Jumlah Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diperiksa dan diawasi	70 unit usaha	137.682.140	
a.	Sub Kegiatan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan),	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	70 unit usaha	125.363.880	Sub Kegiatan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	70 unit usaha	137.682.140	

		<p>Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)</p>				<p>dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p>	<p>kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

D.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Persentase Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	3,30%	477.360.000	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Persentase Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	3,30%	200.364.280	
1.	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	164 unit usaha	477.360.000	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	164 unit usaha	200.364.280	
a.	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	84 unit usaha	175.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab.	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	84 unit usaha	150.364.280	

		kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)					Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)				
b.	Sub Kegiatan Peberdayaan Koperasi dengan keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab.	Koperasi dengan keanggotaan lintas daerah kabupaten/lota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diberdayakan	80 unit usaha	302.360.000	Sub Kegiatan Peberdayaan Koperasi dengan keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua	Koperasi dengan keanggotaan lintas daerah kabupaten/lota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diberdayakan	80 unit usaha	50.000.000	

		Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)					kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)				
E.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan		Persentase pertumbuhan wirausaha	6,00%	1.089.685.230	Program Pemberdayaan Usaha Menengah,		Persentase pertumbuhan wirausaha	6,00%	678.585.680	

	Usaha Mikro (UMKM)					Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)					
1.	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Usaha kecil yang diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	205 unit usaha	1.089.685.230	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Usaha kecil yang diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	205 unit usaha	678.585.680	
a.	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan,	Jumlah unit usaha UMKM yang Tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan	205 unit usaha	939.685.230	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua	Jumlah unit usaha UMKM yang Tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan	205 unit usaha	602.185.680	

		semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)					kecamatan, semua kelurahan)				
b.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	100 orang	150.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	100 orang	76.400.000	

		(semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)					kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)				
F.	Program Pengembangan UMKM		Persentase UMKM Naik Kelas	3,00%	882.932.360	Program Pengembangan UMKM		-	-	419.328.560	
1.	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	145 unit usaha	882.932.360	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha		Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	145 unit usaha	419.328.560	

						Menjadi Usaha Menengah					
a.	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan),	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	110 Unit Usaha	219.328.560	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	110 Unit Usaha	219.328.560	

		Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)									
b.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan,	Jumlah pelaku UMKM yang memahami literasi hukum	35 orang	263.603.800	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	Jumlah pelaku UMKM yang memahami literasi hukum	35 orang	50.000.000	

		semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)									
b.	Sub Kegiatan Penumbuhan dan pengembangan Kewirausahaan	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana	Wirausaha yang difasilitasi	100 orang	200.000.000	Sub Kegiatan Penumbuhan dan pengembangan Kewirausahaan	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua	Wirausaha yang difasilitasi	100 orang	100.000.000	

		(semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)					kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)				
c.	Sub Kegiatan Fasilitasi inkubator usaha kecil	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan),	Jumlah usaha kecil yang terfasilitasi	10 unit usaha	200.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi inkubator usaha kecil	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem	Jumlah usaha kecil yang terfasilitasi	10 unit usaha	50.000.000	

		Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangase m (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)					(semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)					
	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH				8.583.668.088						628.868.310	

	URUSAN PEMERINTAHAN WAIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.583.668.088					628.868.310	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				8.583.668.088					628.868.310	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	82.38 Nilai	574.627.808	PROGRA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	82.38 Nilai	453.504.030	
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	2 dokumen	75.763.380	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	2 dokumen	64.404.050	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	766.360	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	700.000	
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	4.873.470	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	2.800.000	

c.	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	1 paket	46.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	56.904.050	
d.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1.150.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1.000.000	
e.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1 laporan	1.150.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1 laporan	1.000.000	
f.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	21.823.550	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	2.000.000	
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 dokumen	233.351.986	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 dokumen	207.728.560	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1.000.000	
b.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	48.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	48.500.000	

c.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	183.851.986	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	158.228.560	
3.	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 dokumen	265.512.442	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 dokumen	181.371.420	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 unit	129.984.942	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 unit	94.007.140	
b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	32.027.500	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 unit	2.000.000	
c.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	103.500.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	85.364.280	
B.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi	25.00%	8.009.040.280	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi	25.00%	175.364.280	

1.	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut pendidikan dan latihan perkoperasian	410 orang	8.009.040.280	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut pendidikan dan latihan perkoperasian	410 Orang	175.364.280	
a.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kopetensi SDM Koperasi	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	410 orang	8.009.040.280	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kopetensi SDM Koperasi	Kab. Badung, (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Bangli (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Buleleng (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Gianyar (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Jembrana (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Karangasem (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	410 orang	175.364.280	

		kelurahan), Kab. Klungkung (semua kecamatan, semua kelurahan), Kab. Tabanan (semua kecamatan, semua kelurahan), Kota Denpasar (semua kecamatan, semua kelurahan)										
		JUMLAH			30.492.907.174						18.327.335.849	